

# ***Key Drivers of High-Quality Financial Reports in Public Sector: Insights from Indonesia's Supreme Court***

## **Faktor Penentu Kualitas Laporan Keuangan Sektor Publik: Studi Kasus Di Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Lia Safitri<sup>1)</sup>, Sriyono<sup>\*2)</sup>, Sigit Hermawan<sup>3)</sup>

<sup>1) 2) 3)</sup> Program Studi Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: sriyono@umsida.ac.id

**Abstract.** *This study examines the impact of human resource competence on the quality of financial statements within the Supreme Court and its subordinate units, with government accounting standards and internal control over financial reporting acting as mediating variables. The study uses an explanatory design and employs a quantitative approach. Data were collected from 285 respondents across various judicial institutions, and Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) using SmartPLS 4.0 was used to analyze it. The findings show that human resource competence positively influences the application of government accounting standards and internal control, both of which significantly enhance the quality of financial reporting. Furthermore, both mediating variables strengthen the relationship between human resource competence and financial statement quality. These results emphasize the critical role of human resource competence in improving accounting practices and internal controls to achieve higher financial reporting quality.*

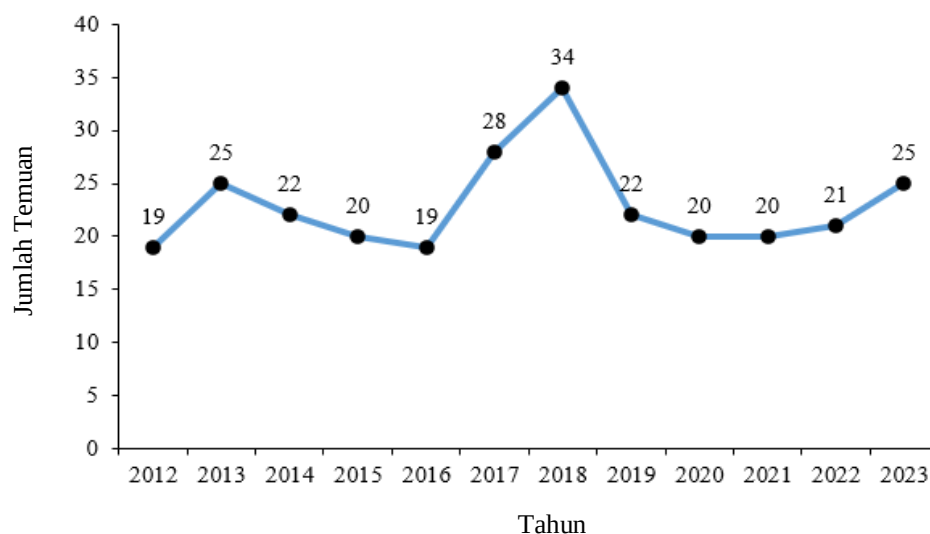
**Keywords** - Human Resource Competence; Government Accounting Standards; Internal Control; Financial Report Quality; Supreme Court

**Abstrak.** *Penelitian ini mengkaji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya, dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan desain eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan dari 285 responden yang berasal dari berbagai institusi peradilan, dan dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui perangkat lunak SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan SAP dan PIPK, yang keduanya secara signifikan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Selain itu, kedua variabel mediasi tersebut memperkuat hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan. Temuan ini menegaskan pentingnya peran kompetensi sumber daya manusia dalam memperbaiki praktik akuntansi dan pengendalian internal guna mencapai kualitas pelaporan keuangan yang lebih tinggi.*

**Kata Kunci** - Kompetensi Sumber Daya Manusia; Standar Akuntansi Pemerintahan; Pengendalian Intern; Kualitas Laporan Keuangan; Mahkamah Agung

### **I. PENDAHULUAN**

Laporan keuangan di sektor publik sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan transparansi, yang merupakan unsur krusial dalam akuntabilitas dan pencegahan korupsi [1][2]. Pelaporan keuangan yang andal, dengan dukungan tata kelola yang baik, memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat [3][4]. Kualitas laporan keuangan menjadi indikator utama yang mencerminkan kredibilitas dan akurasi informasi yang disampaikan [5]. Di Indonesia, kualitas laporan keuangan pemerintah diukur melalui opini audit, di mana opini yang lebih tinggi menunjukkan tingkat transparansi dan kepatuhan yang lebih baik [6]. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melaporkan bahwa Mahkamah Agung telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut (2012–2023), yang mencerminkan konsistensi kualitas laporan keuangan. Namun demikian, jumlah temuan audit BPK tetap signifikan setiap tahunnya, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



**Gambar 1. Jumlah Temuan Hasil Audit BPK (2012–2023)**

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung, 2023\

Gambar tersebut menunjukkan bahwa jumlah temuan audit dari tahun 2012 hingga 2023 relatif tinggi, dengan rata-rata temuan berada pada kisaran 20-an. Analisis terhadap temuan BPK dari tahun 2021 hingga 2023 mengindikasikan adanya masalah yang berulang dalam pengelolaan keuangan, seperti ketidaksesuaian dalam pengadministrasian PNPB, ketidaktepatan pembayaran gaji dan honorarium, ketidakefisienan dalam pengadaan barang/jasa, serta pencatatan aset yang belum memadai. Permasalahan ini diperparah oleh minimnya digitalisasi keuangan yang menyebabkan ketidaktepatan data dan inefisiensi [7][8][9]. Sementara sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada pemerintah daerah, penelitian ini secara khusus mengkaji Mahkamah Agung dan satuan kerjanya, sebagai bagian dari pemerintah pusat yang beroperasi di bawah kerangka regulasi yang berbeda. Pengelolaan laporan keuangan di berbagai lembaga peradilan, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, menimbulkan tantangan tersendiri dalam memastikan konsistensi praktik akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, seluruh kementerian dan lembaga diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana dijabarkan dalam PMK No. 22/PMK.05/2022 terkait realisasi anggaran, arus kas, dan neraca [10][11]. Laporan keuangan yang berkualitas dicirikan oleh keterpahaman, relevansi, keandalan, dan kelengkapan, yang semuanya didukung oleh penerapan standar akuntansi yang konsisten [12]. Dalam sektor publik, implementasi SAP terbukti dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai studi terkait pengelolaan keuangan daerah [13]. Selain itu, adopsi standar akuntansi internasional berbasis kas juga menunjukkan peningkatan dalam kualitas pelaporan, termasuk kejelasan dalam penyajian informasi laba bersih dan arus kas [14]. Meskipun SAP berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia dalam menerapkannya [15].

Di samping standar akuntansi, sistem pengendalian internal merupakan elemen penting dalam menjaga keandalan dan integritas informasi keuangan. PMK No. 232/PMK.05/2022 mengharuskan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran untuk mengonsolidasikan data keuangan dari satuan kerja di bawahnya dan menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), sementara PMK No. 17/PMK.09/2019 menekankan pentingnya pengendalian internal sebagai fondasi transparansi. Mekanisme pengendalian internal yang efektif terbukti secara langsung meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas publik [16]. Namun demikian, implementasi PIPK di lingkungan Mahkamah Agung masih belum optimal karena keterbatasan pemahaman dan tidak adanya proses evaluasi yang sistematis, sehingga mengurangi potensinya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan [17]. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya sumber daya manusia yang kompeten untuk menerapkan SAP dan PIPK secara efektif [18][19].

Meskipun pentingnya kompetensi SDM telah diakui, temuan empiris menunjukkan hasil yang bervariasi. Di Provinsi Jambi, kompetensi SDM terbukti memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik terhadap kualitas pelaporan keuangan, menandakan perlunya pelatihan dan pengembangan berkelanjutan [20]. Demikian pula, penelitian lain melaporkan bahwa kualitas SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah, sementara standar akuntansi dan pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan positif, yang mengindikasikan bahwa kekuatan sistem dapat lebih menentukan dibandingkan dengan kapabilitas individu [21].

Sebaliknya, studi lain menemukan bahwa organisasi dengan modal manusia yang kuat cenderung menghasilkan laporan berkualitas tinggi dan menghadapi lebih sedikit temuan audit, yang menguatkan pentingnya peran strategis SDM dalam meningkatkan akuntabilitas sektor publik [22][23]. Temuan yang beragam ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian terkait bagaimana kompetensi SDM berinteraksi dengan SAP dan PIPK, khususnya dalam institusi pemerintah pusat yang kompleks seperti Mahkamah Agung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji bagaimana kompetensi SDM memengaruhi kualitas laporan keuangan melalui peran mediasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), secara khusus pada Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Kontribusi penelitian ini mencakup beberapa dimensi penting. Pertama, penelitian ini mengeksplorasi konteks institusional yang jarang dikaji, yaitu Mahkamah Agung sebagai bagian dari pemerintah pusat, yang memberikan perspektif berbeda dibandingkan dengan studi yang lebih banyak berfokus pada pemerintah daerah. Analisis ini berpijak pada Teori Institusional yang dikembangkan oleh Oliver (1991) dan Scott (2001), yang memandang akuntansi sebagai sistem sosial yang dibentuk oleh kerangka regulasi dan norma organisasi. Teori ini menjelaskan bagaimana perubahan institusional, seperti adopsi IFRS dan GAAP, dipengaruhi oleh dinamika transnasional dan kebiasaan yang telah melekat dalam institusi [24][25].

Kedua, penelitian ini mengintegrasikan SAP dan PIPK sebagai variabel mediasi dalam satu model analisis yang komprehensif untuk memahami hubungan antara kompetensi SDM dan kualitas pelaporan keuangan. Kerangka ini didukung oleh bukti perilaku yang menunjukkan bahwa peningkatan self-efficacy melalui pelatihan dan pendampingan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelaporan, serta norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku dapat memengaruhi niat untuk melakukan kecurangan [26][27]. Ketiga, penelitian ini menguji hubungan tersebut secara empiris pada berbagai jenis pengadilan, termasuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia. Kontribusi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan berbasis bukti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan di sektor publik pusat. Selain itu, pendekatan *Resource-Based View (RBV)* mendukung penelitian ini dengan menekankan bahwa sumber daya organisasi, baik berwujud maupun tidak berwujud, memainkan peran penting dalam mencapai keunggulan kompetitif dan peningkatan kinerja. Perspektif ini memandu pengambilan keputusan manajerial untuk memanfaatkan kapabilitas internal secara strategis [28]. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik serta memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pengelolaan keuangan publik, khususnya pada institusi yang kompleks dan hierarkis seperti lembaga peradilan.

## II. LITERATUR REVIEW

### Mahkamah Agung sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)

Mahkamah Agung berfungsi sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan, dan akuntabilitas keuangan negara. Dalam pelaksanaannya, laporan keuangan Mahkamah Agung mencakup tujuh unit kerja Eselon I sebagai UAKPA, sebagaimana dirinci dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Rekapitulasi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Mahkamah Agung**

| No | Es I Code | Description                                         | Number of Authority Types |                                                                                                                   |
|----|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |                                                     | Head Office               | Regional Office                                                                                                   |
| 1  | 01        | Badan Urusan Administrasi                           | 1                         | 923 satuan kerja terdiri atas Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer |
| 2  | 02        | Kepaniteraan                                        | 1                         | -                                                                                                                 |
| 3  | 03        | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum            | 1                         | 416 satuan kerja Peradilan Umum                                                                                   |
| 4  | 04        | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama           | 1                         | 446 satuan kerja Peradilan Agama                                                                                  |
| 5  | 05        | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN | 1                         | 61 satuan kerja Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara                                                 |

|   |    |                                                                                       |   |   |
|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 6 | 06 | Badan Penelitian dan Pengembangan,<br>Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan<br>Peradilan | 1 | - |
| 7 | 07 | Badan Pengawasan                                                                      | 1 | - |

Sumber : Laporan Keuangan Mahkamah Agung, 2023

Mahkamah Agung terdiri dari beberapa unit Eselon I yang berperan sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), masing-masing bertanggung jawab untuk mengonsolidasikan laporan keuangan dari berbagai jenis pengadilan sesuai dengan alokasi DIPA yang dimilikinya.

1. Pertama, Unit Eselon I – Badan Urusan Administrasi bertanggung jawab atas UAKPA DIPA-01 (Non-Teknis), mengawasi pelaporan keuangan seluruh unit kerja non-teknis di bawah Mahkamah Agung, termasuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TUN, dan Peradilan Militer.
2. Kedua, Unit Eselon I – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengelola UAKPA DIPA-03 (Teknis) dan mengonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh unit kerja Peradilan Umum.
3. Ketiga, Unit Eselon I – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama bertugas untuk UAKPA DIPA-04 (Teknis), mengonsolidasikan laporan dari unit kerja Peradilan Agama.
4. Keempat, Unit Eselon I – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN menangani UAKPA DIPA-05 (Teknis), bertanggung jawab atas konsolidasi laporan keuangan dari unit kerja Peradilan Militer dan Peradilan TUN.

### Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan memfasilitasi transparansi dan memungkinkan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya untuk menilai tingkat akuntabilitas pemerintah, karena laporan tersebut menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi keuangan yang penting [29]. Laporan keuangan yang akurat dan transparan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sekaligus mendorong penggunaan sumber daya publik secara efektif dan efisien. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi penting tidak hanya untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan operasional suatu entitas dalam menggunakan sumber daya ekonomi, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan informasi pemangku kepentingan terkait sumber daya yang tersedia dan kewajiban yang dimiliki [30].

Kualitas pelaporan keuangan mengacu pada sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi yang akurat, autentik, dan wajar terkait aktivitas usaha, posisi keuangan, dan kinerja perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan tersebut [31]. Selanjutnya laporan keuangan yang berkualitas tinggi harus memenuhi kriteria Relevansi, Keandalan, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Dipahami [32][33].

### Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) memegang peranan krusial dalam meningkatkan kinerja individu dan daya saing organisasi melalui pengembangan dan evaluasi berkelanjutan, sehingga memungkinkan adaptasi terhadap lingkungan kerja yang dinamis [34]. Departemen SDM yang kompeten secara aktif menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan yang berfokus pada standar akuntansi dan manajemen keuangan. Program-program ini memastikan bahwa pegawai selalu mengikuti perkembangan terbaru regulasi akuntansi, yang sangat penting dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan [35].

Selain itu, kompetensi SDM juga berperan dalam proses rekrutmen dan retensi tenaga akuntansi yang terampil. Dengan menarik dan mempertahankan individu yang memiliki keahlian dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), organisasi dapat menjamin tersedianya SDM yang mumpuni dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku [36]. Oleh karena itu, kompetensi SDM menjadi faktor kunci dalam implementasi SAP. Kemampuan dalam manajemen keuangan dan prinsip akuntansi memungkinkan personel untuk menerapkan standar tersebut secara efektif, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan pemerintah.

Kompetensi pegawai berpengaruh positif terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual di institusi pemerintah. Penelitian tersebut menekankan bahwa peningkatan keterampilan pegawai melalui pelatihan dan pengembangan terkait praktik serta pengetahuan akuntansi sangat penting [37]. Kompetensi yang meningkat memungkinkan pegawai memahami dan menerapkan SAP dengan lebih baik. Dengan demikian, investasi dalam pelatihan pegawai dapat membentuk budaya organisasi yang mendukung implementasi akuntansi berbasis akrual secara efektif. Penelitian serupa juga menunjukkan bahwa kompetensi SDM secara signifikan memengaruhi implementasi SAP dengan memastikan bahwa tenaga profesional yang andal dapat menjalankan standar ini secara efektif [38].

H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan**

Dalam konteks pengelolaan laporan keuangan, kompetensi (pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik personal) berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, sehingga mendukung penerapan praktik tata kelola yang baik [39]. Tingkat kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Kapabilitas sumber daya manusia yang tinggi dalam bidang akuntansi dan pengendalian intern meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan memastikan bahwa pengelola keuangan mampu melaksanakan serta mematuhi sistem pengendalian intern secara efektif. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia menjadi esensial untuk memperkuat efektivitas pengendalian intern [40].

Lebih lanjut, kompetensi sumber daya manusia secara signifikan memengaruhi implementasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Pegawai dengan kompetensi lebih tinggi dalam manajemen keuangan, penilaian risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi lebih mampu menerapkan mekanisme pengendalian intern yang efektif. Kapabilitas sumber daya manusia yang kuat tidak hanya menjamin akurasi pelaporan keuangan, tetapi juga meminimalkan kesalahan dan kecurangan, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

H2: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam menjamin integritas keuangan, karena mencakup kemampuan individu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif, yang diperoleh melalui pelatihan, pendidikan, serta pengalaman kerja yang relevan [41]. Kompetensi sumber daya manusia terbukti berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan, di mana semakin tinggi kompetensi pegawai, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan [42]. Temuan ini didukung oleh penelitian lain yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah [43][44]. Namun, hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian lain yang menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan [45]. Perbedaan ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kompetensi sumber daya manusia pada objek penelitian, di mana banyak pegawai yang bertugas di bidang keuangan/administrasi tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

H3: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

### **Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Secara internasional, Standar Akuntansi Sektor Publik atau International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbandingan laporan keuangan sektor publik secara global. IPSAS berbasis akrual memberikan kerangka standar pelaporan keuangan yang lebih relevan bagi pengambilan keputusan, serta mendukung efisiensi pengelolaan keuangan publik [46]. Di Indonesia, Standar Akuntansi Pemerintahan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengadopsi basis akrual sebagai pendekatan utama dalam pelaporan keuangan. Basis akrual memungkinkan pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas secara lebih akurat berdasarkan hak dan kewajiban, bukan semata-mata arus kas. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah dengan menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi para pemangku kepentingan, termasuk publik, lembaga pengawas, dan instansi pemerintah dalam menilai kinerja, pengelolaan sumber daya, serta posisi keuangan [47]. Penerapan standar yang lebih ketat juga penting dalam menjaga kepercayaan publik, memastikan integritas laporan keuangan di masa depan, dan membangun sistem pelaporan yang lebih transparan [48].

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik penerapannya, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan [49][50]. Temuan serupa juga disampaikan oleh lainnya yang menyimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan [51]. Namun, hasil berbeda menemukan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan justru berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan, yang dikaitkan dengan pengaruh variabel eksternal yang lebih dominan [52].

H4: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

### **Pengaruh Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Pengendalian intern di sektor keuangan merupakan sistem pengawasan yang dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan efisiensi operasional, serta mencegah dan mendeteksi kecurangan melalui pemisahan tugas, otorisasi transaksi, dan pengamanan informasi [53]. Sistem ini juga berperan penting dalam menjaga akurasi laporan keuangan dengan melakukan rekonsiliasi data serta penerapan standar akuntansi, sehingga menjamin integritas keuangan, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dalam konteks lembaga pemerintah, pengendalian intern berfungsi melindungi serta mengarahkan aktivitas agar selaras dengan tujuan dan program yang telah ditetapkan, dengan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan sistem berjalan optimal [54]. Dengan demikian, pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan pemerintah merupakan upaya sistematis untuk mewujudkan tata kelola yang akuntabel, efisien, dan berintegritas dalam rangka mencapai tujuan strategis pemerintah.

Terdapat lima komponen utama pengendalian intern, yaitu: lingkungan pengendalian, penerapan prosedur pengendalian, penilaian risiko, komunikasi dan informasi, serta pemantauan [55]. Sebuah penelitian menemukan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh parsial terhadap kualitas pelaporan keuangan, dengan nilai signifikansi  $0,009 < 0,050$  [56]. Temuan ini didukung oleh penelitian lain yang menyatakan bahwa perbaikan pengendalian intern secara langsung berkontribusi pada tercapainya laporan keuangan yang berkualitas [57]. Namun, terdapat penelitian yang melaporkan hasil berbeda, yaitu penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak memberikan dampak positif terhadap kualitas pelaporan keuangan [58]. Hal ini disebabkan meskipun secara formal telah sesuai regulasi, masih ditemukan masalah seperti ketidakpatuhan, pegawai yang menjalankan multitugas, serta kurangnya perhatian terhadap keamanan aset fisik.

H5: Implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan**

Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) didefinisikan sebagai keterampilan, kemampuan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara efektif. Kompetensi ini mencakup keahlian teknis, atribut perilaku, serta kemampuan berinovasi seperti fleksibilitas, ketekunan, komunikasi, dan adaptasi terhadap perubahan [59]. Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Standar akuntansi berfungsi sebagai mekanisme penghubung yang memastikan laporan keuangan disusun sesuai prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga meningkatkan relevansi dan keandalan informasi keuangan.

Kompetensi sumber daya manusia, termasuk pengetahuan akuntansi, pengalaman, serta pelatihan manajemen keuangan, berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pegawai yang kompeten lebih mampu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan benar, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan andal. Kompetensi sumber daya manusia menjadi krusial dalam implementasi standar akuntansi, karena pegawai yang kompeten mampu menginterpretasikan dan mengaplikasikan standar dengan tepat, sehingga laporan keuangan dapat disusun sesuai ketentuan yang berlaku [60].

Kompetensi sumber daya manusia juga menjamin konsistensi kepatuhan terhadap standar akuntansi, yang penting untuk menjaga kredibilitas dan keterbandingan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan pemangku kepentingan. Lebih jauh, kompetensi ini mendorong perbaikan berkelanjutan dalam praktik akuntansi, di mana pegawai senantiasa mengikuti perkembangan standar akuntansi dan praktik terbaik, serta memimpin inisiatif untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan manajemen keuangan secara keseluruhan [61].

H6: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)**

Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian intern, maka semakin efektif pula sistem pengendalian intern yang diterapkan. Sistem pengendalian intern yang kuat akan memastikan bahwa proses pelaporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, meminimalkan kesalahan dan kecurangan, serta meningkatkan akurasi dan keandalan informasi keuangan. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia secara tidak langsung meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui efektivitas pengendalian intern.

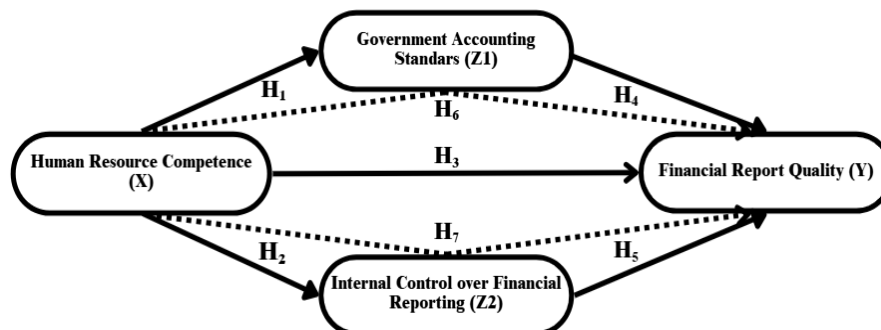
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (Internal Control over Financial Reporting/ICFR) merupakan suatu sistem yang menjamin keandalan laporan keuangan melalui kepatuhan terhadap kerangka pelaporan yang berlaku, pencegahan terhadap kesalahan dan kecurangan, peningkatan akuntabilitas dan tata kelola, serta diperkuat oleh modal intelektual dan kekuatan institusional untuk menjunjung tinggi transparansi dan integritas dalam pelaporan, khususnya pada organisasi yang memiliki akuntabilitas publik [62].

Kompetensi sumber daya manusia secara signifikan memengaruhi efektivitas pengendalian intern atas pelaporan keuangan [63]. Studi mereka menunjukkan bahwa tingkat kompetensi sumber daya manusia yang lebih tinggi berkontribusi terhadap sistem pengendalian intern yang lebih efektif, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hubungan ini mengindikasikan bahwa personel yang memiliki kualifikasi yang baik lebih mampu dalam menerapkan dan mempertahankan sistem pengendalian intern, sehingga dapat memastikan laporan keuangan

yang akurat dan andal. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi hal yang esensial dalam memperkuat sistem pengendalian intern dalam suatu organisasi.

H7: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

### Kerangka Konseptual



Gambar 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang ditampilkan pada Gambar 2 menggambarkan hubungan antara kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, pengendalian intern atas pelaporan keuangan, dan kualitas laporan keuangan.

### III. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang melibatkan pengumpulan data numerik dan penerapan teknik analisis untuk menguji hipotesis, menarik kesimpulan, serta memahami hubungan antar variabel yang diteliti [64]. Objek penelitian ini adalah Mahkamah Agung sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta membawahi seluruh satuan kerja di bawahnya yang berfungsi sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Sebagai UAPA, Mahkamah Agung memegang peranan strategis dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi keuangan di berbagai satuan kerja, termasuk pengadilan tingkat pertama dan banding dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer.

Populasi merujuk pada seluruh unit analisis yang memiliki karakteristik serupa atau relevan dengan permasalahan penelitian [64]. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh unit akuntansi pada tingkat eselon I serta seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai UAKPA dalam penyusunan dan pelaporan keuangan. Secara keseluruhan, terdapat 930 unit/satuan kerja akuntansi yang tersebar di seluruh Indonesia. Rincian jumlah tersebut disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Populasi

| Unit Akuntansi     | Jumlah Satuan Kerja |
|--------------------|---------------------|
| Eselon I           | 7                   |
| Pengadilan Negeri  | 416                 |
| Pengadilan Agama   | 446                 |
| Pengadilan Militer | 23                  |
| Pengadilan TUN     | 38                  |
| Total              | 930                 |

Sumber: Mahkamah Agung, 2024

Dalam penelitian ini, sampel diambil menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin umumnya digunakan untuk menentukan ukuran sampel yang representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasi dengan tepat [65]. Pada penelitian ini, margin of error (e) ditetapkan sebesar 0,05 atau 5%. Rumus Slovin yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n= ukuran sampel yang dibutuhkan

N= jumlah populasi

e = margin of error (0,05)

Dengan menerapkan metode proportionate stratified sampling dan rumus Slovin, sebanyak 285 pegawai dipilih sebagai sampel penelitian. Responden ini memiliki pengetahuan yang memadai tentang proses penyusunan dan pelaporan keuangan di berbagai unit organisasi, termasuk eselon I di Mahkamah Agung, serta pengadilan negeri, agama, militer, dan tata usaha negara. Untuk menangkap persepsi responden, dikembangkan kuesioner terstruktur dengan menggunakan skala Likert 5 poin, dari 1 (“sangat tidak setuju”) hingga 5 (“sangat setuju”).

Sebelum penyebaran kuesioner utama, dilakukan uji coba instrumen (pilot test) terhadap 30 responden menggunakan SPSS untuk menilai validitas dan reliabilitas awal. Analisis korelasi Pearson menunjukkan hubungan yang kuat dan signifikan secara statistik antar variabel ( $p < 0,01$ ), yang mengonfirmasi validitas konstruk. Uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,943 pada empat konstruk utama, yaitu: kompetensi sumber daya manusia (X1), standar akuntansi pemerintahan (Z1), pengendalian intern atas pelaporan keuangan (Z2), dan kualitas laporan keuangan (Y), yang mengindikasikan konsistensi internal yang sangat baik.

Aspek etika penelitian diperhatikan secara menyeluruh, antara lain dengan memberikan informasi kepada partisipan mengenai tujuan penelitian, menjamin kerahasiaan data, memperoleh informed consent, dan menekankan bahwa partisipasi bersifat sukarela. Seluruh tanggapan juga dianonimkan sesuai dengan standar etika penelitian ilmiah.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Hasil

Pemahaman terhadap distribusi responden sangat penting untuk menilai representativitas sampel pada berbagai unit akuntansi di bawah Mahkamah Agung. Penelitian ini mengklasifikasikan partisipan berdasarkan kategori institusional masing-masing, termasuk unit Eselon I, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Setiap jenis institusi memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam proses penyusunan dan konsolidasi laporan keuangan. Tabel berikut menyajikan informasi rinci terkait distribusi responden, mencakup frekuensi, persentase, dan perbandingan sampel terhadap total unit akuntansi untuk setiap kategori. Klasifikasi ini membantu memperjelas ruang lingkup penelitian dan memastikan bahwa temuan mencerminkan keragaman lingkungan akuntansi peradilan.

**Tabel 3. Identitas Responden**

| Karakteristik  | Kategori                                      | Frekuensi | Persentase (%) | Perbandingan Sampel terhadap Unit Akuntansi (%)       | Total             |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Unit Akuntansi | Eselon 1                                      | 7         | 2.5%           | 100% dari total 7 unit Eselon I                       | 285 sampel (100%) |
|                | Pengadilan Negeri                             | 107       | 37.5%          | 30,53% dari total 416 unit Peradilan Umum             |                   |
|                | Pengadilan Tinggi                             | 20        | 7.0%           |                                                       |                   |
|                | Pengadilan Agama                              | 110       | 38.6%          | 29,82% dari total 446 unit Peradilan Agama            |                   |
|                | Pengadilan Tinggi Agama                       | 23        | 8.1%           |                                                       |                   |
|                | Pengadilan TUN                                | 9         | 3.2%           | 31,58% dari total 38 unit Peradilan tata usaha negara |                   |
|                | Pengadilan Tinggi TUN                         | 3         | 1.1%           |                                                       |                   |
|                | Pengadilan Militer                            | 5         | 1.75%          | 26,09% dari total 23 unit Peradilan Militer           |                   |
| Jabatan        | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN (APK APBN) | 133       | 46.7%          | 285 sampel (100%)                                     |                   |



|              |                                   |     |       |                   |
|--------------|-----------------------------------|-----|-------|-------------------|
|              | Pengelola Keuangan APBN (PK APBN) | 91  | 31.9% |                   |
|              | Bendahara                         | 19  | 6.7%  |                   |
|              | Kepala Subbagian Keuangan         | 10  | 3.5%  |                   |
|              | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)    | 6   | 2.1%  |                   |
|              | Pengelola Keuangan Lainnya        | 26  | 9.1%  |                   |
| Lama Bekerja | 1 - 5 Tahun                       | 62  | 21.8% | 285 sampel (100%) |
|              | 6 - 10 Tahun                      | 32  | 11.2% |                   |
|              | 11 - 15 Tahun                     | 108 | 37.9% |                   |
|              | > 15 Tahun                        | 83  | 29.1% |                   |

Distribusi responden menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki jumlah responden terbanyak, yaitu 110 orang (38,6%), disusul oleh Pengadilan Negeri sebanyak 107 responden (37,5%). Pengadilan Tinggi Agama menyumbang 23 responden (8,1%), dan Pengadilan Tinggi sebanyak 20 responden (7,0%). Pengadilan TUN berkontribusi 9 responden (3,2%), sedangkan Pengadilan Tinggi TUN sebanyak 3 responden (1,1%). Pengadilan Militer dan Pengadilan Tinggi Militer memiliki jumlah responden paling sedikit, masing-masing 5 orang (1,75%) dan 1 orang (0,4%). Distribusi responden dari unit Eselon I berjumlah 7 orang (2,5%).

Berdasarkan perbandingan antara jumlah sampel dan jumlah unit akuntansi pada masing-masing jenis pengadilan, pada tingkat Eselon I terdapat 7 responden yang merepresentasikan 100% dari seluruh unit akuntansi di tingkat tersebut. Pengadilan Negeri memiliki 107 responden, dan Pengadilan Tinggi 20 responden dari total 416 unit, sehingga merepresentasikan 30,53%. Pengadilan Agama memiliki 110 responden, dan Pengadilan Tinggi Agama sebanyak 23 responden dari total 446 unit, mewakili 29,82% dari total unit. Pengadilan TUN dengan 9 responden dan Pengadilan Tinggi TUN dengan 3 responden dari 38 unit, menghasilkan representasi sebesar 31,58%. Pengadilan Militer dengan 5 responden dan Pengadilan Tinggi Militer dengan 1 responden dari 23 unit menunjukkan representasi sebesar 26,09%. Secara keseluruhan, distribusi sampel cukup proporsional terhadap jumlah unit akuntansi pada berbagai jenis pengadilan, meskipun terdapat variasi dalam tingkat representasi.

Berdasarkan distribusi jabatan responden, mayoritas adalah Analis Pengelolaan Keuangan APBN (APK APBN) sebanyak 133 orang (46,7%), disusul oleh Pengelola Keuangan APBN (PK APBN) sebanyak 91 orang (31,9%). Bendahara sebanyak 19 orang (6,7%), Kepala Subbagian Keuangan sebanyak 10 orang (3,5%), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebanyak 6 orang (2,1%). Sebanyak 26 responden (9,1%) dikategorikan sebagai Pengelola Keuangan Lainnya. Distribusi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan tenaga spesialis keuangan APBN, baik sebagai analis maupun pengelola, yang mencerminkan bahwa penelitian ini melibatkan individu-individu yang berperan penting dalam manajemen keuangan di lingkungan kerjanya masing-masing.

Dari segi pengalaman kerja, mayoritas responden memiliki masa kerja 11–15 tahun, yaitu sebanyak 108 orang (37,9%), diikuti oleh responden dengan masa kerja lebih dari 15 tahun sebanyak 83 orang (29,1%). Responden dengan pengalaman kerja 1–5 tahun berjumlah 62 orang (21,8%), sementara yang memiliki pengalaman 6–10 tahun berjumlah paling sedikit, yaitu 32 orang (11,2%). Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun, mengindikasikan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki tingkat keahlian yang cukup tinggi dalam bidangnya masing-masing.

#### Uji Model Pengukuran dengan SmartPLS 4.0

Uji model pengukuran dilakukan menggunakan SmartPLS 4.0, dengan melihat hasil dari uji validitas konvergen, validitas diskriminan, dan uji reliabilitas. Berdasarkan analisis Outer Loading dalam Tabel 4, seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid karena memenuhi nilai ambang batas di atas 0,7. Oleh karena itu, tidak ada indikator yang dieliminasi, dan model penelitian dapat dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya.

**Tabel 4.** Uji Validitas

| Variabel                  | Pertanyaan | Outer Loading | Keterangan |
|---------------------------|------------|---------------|------------|
| Kualitas Laporan Keuangan | FRQ1       | 0.904         | Valid      |
|                           | FRQ2       | 0.773         | Valid      |

|                                                                                                           |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| <i>(Financial Report Quality)</i>                                                                         | FRQ3  | 0.936 | Valid |
|                                                                                                           | FRQ4  | 0.941 | Valid |
|                                                                                                           | FRQ5  | 0.893 | Valid |
| Standard Akuntansi<br>Pemerintah<br><i>(Government Accounting Standards)</i>                              | GAS1  | 0.913 | Valid |
|                                                                                                           | GAS2  | 0.895 | Valid |
|                                                                                                           | GAS3  | 0.931 | Valid |
|                                                                                                           | GAS4  | 0.902 | Valid |
| Kompetensi Sumber<br>Daya Manusia<br><i>(Human Resource Competence)</i>                                   | HRC1  | 0.722 | Valid |
|                                                                                                           | HRC2  | 0.900 | Valid |
|                                                                                                           | HRC3  | 0.849 | Valid |
|                                                                                                           | HRC4  | 0.872 | Valid |
|                                                                                                           | HRC5  | 0.764 | Valid |
|                                                                                                           | HRC6  | 0.893 | Valid |
| Pengendalian<br>Internal atas<br>Pelaporan<br>Keuangan <i>(Internal Control over Financial Reporting)</i> | ICFR1 | 0.882 | Valid |
|                                                                                                           | ICFR2 | 0.801 | Valid |
|                                                                                                           | ICFR3 | 0.889 | Valid |
|                                                                                                           | ICFR4 | 0.891 | Valid |
|                                                                                                           | ICFR5 | 0.840 | Valid |
|                                                                                                           | ICFR6 | 0.904 | Valid |
|                                                                                                           | ICFR7 | 0.875 | Valid |
|                                                                                                           | ICFR8 | 0.845 | Valid |

Sumber: Aplikasi SmartPLS 4.0 (Data diolah)

**Tabel 5.** Uji Reabilitas

| Variabel                                                                                            | Cronbach's alpha | Composite reliability (rho_a) | Composite reliability (rho_c) | AVE   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|
| Kualitas Laporan Keuangan<br><i>(Financial Report Quality)</i>                                      | 0.934            | 0.943                         | 0.951                         | 0.795 |
| Standard Akuntansi Pemerintah<br><i>(Government Accounting Standards)</i>                           | 0.931            | 0.933                         | 0.951                         | 0.829 |
| Kompetensi Sumber Daya Manusia<br><i>(Human Resource Competence)</i>                                | 0.912            | 0.923                         | 0.933                         | 0.699 |
| Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan<br><i>(Internal Control over Financial Reporting)</i> | 0.952            | 0.954                         | 0.960                         | 0.751 |

Sumber: Aplikasi SmartPLS 4.0 (Data diolah)

Selanjutnya, berdasarkan hasil uji reliabilitas yang ditampilkan dalam Tabel 5, seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,7, yang menunjukkan konsistensi internal yang baik. Nilai Composite Reliability (rho\_a dan rho\_c) juga melebihi angka 0,7, mengonfirmasi bahwa indikator yang digunakan reliabel dalam mengukur masing-masing variabel. Nilai Average Variance Extracted (AVE) untuk semua variabel juga di atas 0,5, menunjukkan validitas konvergen yang kuat. Dengan demikian, instrumen penelitian ini telah memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas yang diperlukan.

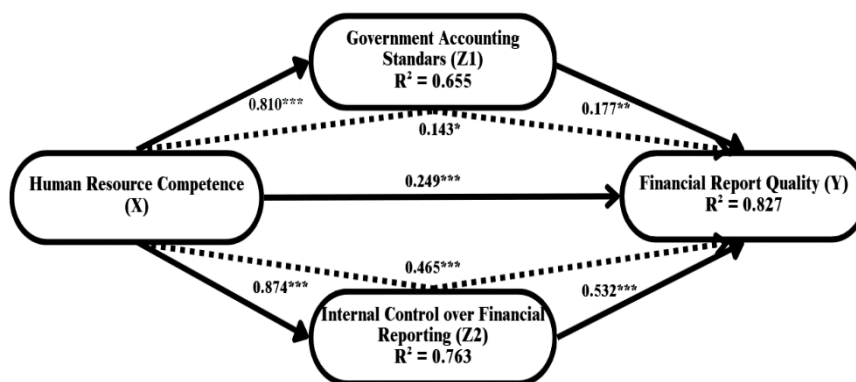
**Tabel 6. R Square**

| Variabel                                                                                           | R-square | R-square adjusted |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Kualitas Laporan Keuangan ( <i>Financial Report Quality</i> )                                      | 0.827    | 0.825             |
| Standard Akuntansi Pemerintah ( <i>Government Accounting Standards</i> )                           | 0.655    | 0.654             |
| Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan ( <i>Internal Control over Financial Reporting</i> ) | 0.763    | 0.763             |

Sumber: Aplikasi SmartPLS 4.0 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel R-Square (Tabel 6), variabel Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki nilai R-square sebesar 0,655, yang berarti 65,5% varians variabel tersebut dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Sementara itu, variabel Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan memiliki nilai R-square sebesar 0,763, menunjukkan bahwa 76,3% variasinya dipengaruhi oleh faktor-faktor independen. Variabel Kualitas Laporan Keuangan menunjukkan nilai R-square tertinggi, yaitu 0,827, yang mengindikasikan bahwa 82,7% variasinya dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun nilai R-square adjusted, yang sedikit lebih rendah, telah disesuaikan dengan jumlah prediktor dalam model guna memberikan estimasi yang lebih akurat terhadap kemampuan prediksi variabel dependen.

Selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman terhadap hubungan antarvariabel yang diteliti, Gambar 3 menyajikan diagram jalur (path diagram) yang memvisualisasikan hasil pengujian model struktural. Diagram ini menggambarkan baik pengaruh langsung maupun tidak langsung dari Kompetensi Sumber Daya Manusia (X) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y), dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Z1) dan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (Z2) sebagai variabel mediasi. Koefisien jalur (path coefficients) menunjukkan kekuatan hubungan antarvariabel dengan tingkat signifikansi statistik. Setiap variabel dependen juga dilengkapi dengan nilai R-square ( $R^2$ ) masing-masing, yang merefleksikan proporsi varians yang dijelaskan oleh variabel independen. Semakin tinggi nilai  $R^2$ , semakin besar daya jelas (explanatory power) dari model yang dibangun.



**Gambar 3. Diagram Jalur Hasil Model – Pengujian Hipotesis Utama.**

**Keterangan:** \*\*\*p-value < 0,001; \*\*p-value < 0,01; \*p-value < 0,05

Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan tiga nilai utama, yaitu Original Sample, T-Statistic, dan P-Value. Nilai T-Statistic yang lebih besar dari 1,96 dan P-Value di bawah 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Arah pengaruh tersebut ditentukan oleh nilai Original Sample, di mana nilai positif menunjukkan pengaruh yang positif, dan nilai negatif menunjukkan pengaruh yang negatif. Hasil pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 7.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ditampilkan dalam Tabel 7, seluruh hipotesis (H1–H7) diterima, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai T-Statistic yang melebihi 1,96 dan P-Value yang berada di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.

**Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis**

| Kode | Hipotesis                                                                                | Original Sample (O) | Sample Mean (M) | Standar Deviasi (STDEV) | T-Statistic | P-Value | Hasil    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-------------|---------|----------|
| H1   | Kompetensi SDM → Standar Akuntansi Pemerintahan                                          | 0,810               | 0,804           | 0,047                   | 17,201      | 0,000   | Diterima |
| H2   | Kompetensi SDM → Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan                             | 0,874               | 0,871           | 0,029                   | 29,768      | 0,000   | Diterima |
| H3   | Kompetensi SDM → Kualitas Laporan Keuangan                                               | 0,249               | 0,248           | 0,071                   | 3,498       | 0,000   | Diterima |
| H4   | Standar Akuntansi Pemerintahan → Kualitas Laporan Keuangan                               | 0,177               | 0,174           | 0,068                   | 2,604       | 0,009   | Diterima |
| H5   | Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan → Kualitas Laporan Keuangan                  | 0,532               | 0,533           | 0,070                   | 7,550       | 0,000   | Diterima |
| H6   | Kompetensi SDM → Standar Akuntansi Pemerintahan → Kualitas Laporan Keuangan              | 0,143               | 0,140           | 0,057                   | 2,504       | 0,012   | Diterima |
| H7   | Kompetensi SDM → Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan → Kualitas Laporan Keuangan | 0,465               | 0,464           | 0,060                   | 7,773       | 0,000   | Diterima |

Sumber: Aplikasi SmartPLS 4.0 (Data diolah)

## B. Pembahasan

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ( $O = 0,810$ ;  $T = 17,201$ ;  $P = 0,000$ ). Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi SDM akan mendorong efektivitas implementasi SAP. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa kualitas SDM mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual [66]. Mendukung temuan tersebut, mengungkapkan bahwa kompetensi SDM secara signifikan mempengaruhi penerapan SAP berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan [67]. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan kompetensi pegawai keuangan menjadi aspek krusial untuk mendukung implementasi SAP yang efektif, guna mewujudkan pelaporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

Selain itu, kompetensi SDM juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengendalian intern atas pelaporan keuangan ( $O = 0,874$ ;  $T = 29,768$ ;  $P = 0,000$ ). Artinya, semakin tinggi kompetensi SDM, semakin kuat sistem pengendalian intern yang dibangun. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kompetensi sangat memengaruhi efektivitas pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Efektivitas sistem pengendalian intern dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas personel pengendalian intern [68]. Dalam kerangka COSO, kompetensi personel menjadi komponen penting dalam lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian yang mendukung akurasi pelaporan keuangan. Temuan ini diperkuat oleh penelitian lain yang menyatakan bahwa latar belakang keuangan dan pengalaman CFO berkorelasi negatif dengan kelemahan pengendalian intern, menunjukkan bahwa semakin kompeten pimpinan keuangan, semakin kuat sistem pengendalian yang diimplementasikan [69].

Secara langsung, kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan ( $O = 0,249$ ;  $T = 3,498$ ;  $P = 0,000$ ), meskipun pengaruhnya relatif lebih kecil dibandingkan pengaruh terhadap SAP dan pengendalian intern. Hal ini mengindikasikan bahwa kompetensi SDM memang berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, namun pengaruh maksimalnya diperoleh melalui jalur tidak langsung. Banyak penelitian juga turut mendukung temuan ini, bahwa SDM dengan pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai di bidang keuangan dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan andal [70][71][72].

Standar Akuntansi Pemerintahan juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan ( $O = 0,177$ ;  $T = 2,604$ ;  $P = 0,009$ ). Artinya, semakin baik implementasi SAP, maka semakin baik pula kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan. Beberapa penelitian menegaskan bahwa penerapan SAP meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah [73][74]. Kepatuhan terhadap SAP maupun IPSAS

berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keterbandingan laporan keuangan, terutama dalam membentuk kerangka akuntabilitas publik yang kuat [75][76].

Pengendalian intern atas pelaporan keuangan memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap kualitas laporan keuangan ( $O = 0,532$ ;  $T = 7,550$ ;  $P = 0,000$ ). Temuan ini menegaskan bahwa sistem pengendalian intern yang efektif sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pengendalian intern yang baik mendukung keakuratan pelaporan keuangan [77]. Dalam kajian penelitian terhadap perusahaan manufaktur di Tiongkok juga menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian intern berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, khususnya setelah penerapan kebijakan pengendalian intern [78]. Demikian pula, sebuah penelitian menyatakan bahwa pengendalian intern menyumbang 20,5% terhadap kualitas laporan keuangan, memperkuat urgensi penerapan sistem pengendalian intern yang memadai [79].

Kompetensi SDM juga memberikan pengaruh tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan melalui SAP sebagai variabel mediasi ( $O = 0,143$ ;  $T = 2,504$ ;  $P = 0,012$ ). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi SDM dapat mendorong implementasi SAP yang lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Banyak hasil penelitian menekankan pentingnya sinergi antara kompetensi SDM dan kerangka SAP dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas [15][80][81]. Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa dampak langsung kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan mungkin tidak optimal tanpa dukungan penerapan SAP yang kuat.

Selanjutnya, kompetensi SDM juga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan melalui pengendalian intern sebagai variabel mediasi ( $O = 0,465$ ;  $T = 7,773$ ;  $P = 0,000$ ). Temuan ini mengindikasikan bahwa pengendalian intern yang efektif merupakan mekanisme penting dalam menjembatani kompetensi SDM dan kualitas pelaporan keuangan. Kompetensi SDM berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan melalui penguatan sistem pengendalian intern [82][83]. Penguatan kompetensi SDM mampu memperkuat pengendalian intern yang selanjutnya meningkatkan kualitas laporan keuangan, khususnya pada sektor pelayanan publik [84].

Meskipun seluruh hipotesis dalam penelitian ini terbukti signifikan secara statistik, diketahui bahwa pengaruh langsung kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan ( $0,249$ ) lebih besar dibandingkan efek tidak langsung melalui SAP ( $0,143$ ), tetapi masih lebih kecil dibandingkan efek tidak langsung melalui pengendalian intern atas pelaporan keuangan ( $0,465$ ). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kompetensi SDM merupakan faktor kunci, dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan menjadi jauh lebih kuat ketika dikombinasikan dengan sistem pengendalian intern yang efektif. Artinya, peningkatan kompetensi individu perlu dibarengi dengan penguatan sistem kelembagaan, guna menghasilkan pelaporan keuangan yang akurat dan akuntabel. Pendekatan sistemik menjadi penting, tidak hanya menitikberatkan pada pengembangan individu, tetapi juga pada perbaikan struktural dan kelembagaan.

## V. SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki peran penting dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang efektif, yang pada akhirnya berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sumber daya manusia yang kompeten sangat dibutuhkan agar standar akuntansi dapat diterapkan dengan benar, data keuangan dicatat secara akurat, dan mekanisme pengendalian internal berfungsi optimal untuk mencegah kesalahan dan kecurangan. Tanpa kompetensi yang memadai, bahkan standar dan mekanisme pengendalian yang sudah dirancang dengan baik pun dapat gagal diimplementasikan, sehingga menimbulkan kesalahan penyajian keuangan dan menurunnya akuntabilitas.

Selain itu, pengaruh langsung dari Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan memperkuat temuan bahwa perbaikan dalam kedua aspek ini akan meningkatkan transparansi, keandalan, dan kegunaan informasi dalam pengambilan keputusan. Penguatan komponen ini tidak hanya memerlukan penyesuaian kebijakan, tetapi juga investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia agar seluruh personel yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan komitmen etis yang diperlukan.

Berdasarkan hasil analisis hipotesis, direkomendasikan agar pemerintah mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pengembangan profesional berkelanjutan, termasuk pelatihan rutin dan sertifikasi wajib dalam akuntansi sektor publik. Selain itu, implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan harus diperkuat melalui pengawasan yang lebih ketat, penyusunan pedoman yang lebih jelas, serta adopsi sistem informasi keuangan yang transparan dan terintegrasi.

Mekanisme pengendalian intern juga perlu diperkuat dengan menerapkan audit berbasis risiko, mengoptimalkan peran auditor internal, dan membentuk sistem pemantauan kepatuhan yang kuat. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyimpangan keuangan dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah sejalan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

Terakhir, peningkatan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi pelaporan keuangan yang canggih, membangun budaya integritas dan transparansi di lingkungan lembaga pemerintah, serta melakukan audit independen secara berkala. Langkah-langkah ini secara kolektif akan berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan publik terhadap pelaporan keuangan dan pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih efektif.

## VI. KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN SELANJUTNYA

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, cakupan penelitian dibatasi pada sektor yudikatif, khususnya pada institusi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu, generalisasi temuan ke sektor pemerintahan lainnya harus dilakukan dengan hati-hati, dan hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya relevan untuk konteks institusi lain. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan dengan melibatkan sektor eksekutif dan legislatif guna memvalidasi dan membandingkan temuan dalam spektrum lembaga publik yang lebih luas.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bantuan SmartPLS dalam analisis data. Meskipun metode ini memberikan bukti statistik yang kuat terkait hubungan antar variabel, pendekatan ini tidak dapat menangkap motivasi, persepsi, dan faktor kontekstual yang mungkin memengaruhi implementasi standar akuntansi dan sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang disarankan menggunakan pendekatan kualitatif atau metode campuran (mixed methods) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terkait dinamika perilaku dan organisasi yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Triangulasi melalui wawancara, diskusi kelompok terfokus (FGD), atau studi kasus juga dapat membantu mengungkap tantangan dan peluang yang tidak terlihat dari data survei saja.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh responden dari satuan kerja di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, atas kesediaan dan partisipasinya dalam memberikan data serta informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas ketersediaan data laporan keuangan tahunan yang menjadi sumber penting dalam mendukung analisis dan penyusunan penelitian ini. Dukungan dan kontribusi dari semua pihak tersebut sangat berarti dalam kelancaran dan keberhasilan penelitian ini.

## REFERENSI

- [1] A. Y. a. B. Ahmad, H. Abusaimh, A. Rababah, M. Alqsass, N. H. Al-Olima, and M. N. Hamdan, "Assessment of effects in advances of accounting technologies on quality financial reports in Jordanian public sector," *Uncertain Supply Chain Management*, vol. 12, no. 1, pp. 133–142, Nov. 2023, doi: 10.5267/j.uscm.2023.10.011.
- [2] T. D. Beshi and R. Kaur, "Public Trust in Local Government: Explaining the role of good governance practices," *Public Organization Review*, vol. 20, no. 2, pp. 337–350, Feb. 2019, doi: 10.1007/s11115-019-00444-6.
- [3] S. Sriyono, D. K. Sari, R. E. Febriansah, and D. Prapanca, "Pendampingan tata kelola dan manajemen pada kegiatan abdimas masjid," *Jurnal Terapan Abdimas*, vol. 4, no. 2, p. 198, Jul. 2019, doi: 10.25273/jta.v4i2.4846.
- [4] N. C. P. Efunniyi, N. A. O. Abbulimen, N. A. N. Obiki-Osafia, N. O. S. Osundare, N. E. E. Agu, and N. I. A. Adeniran, "Strengthening corporate governance and financial compliance: Enhancing accountability and transparency," *Finance & Accounting Research Journal*, vol. 6, no. 8, pp. 1597–1616, Aug. 2024, doi: 10.51594/farj.v6i8.1509.
- [5] N. H. Pangaribuan, N. D. Sunarsi, N. A. Santoso, N. E. S. Wahyuni, and N. H. Yoewono, "Quality of financial statement and the factors that influence it," *Jurnal Akuntansi*, vol. 27, no. 1, pp. 176–196, Jan. 2023, doi: 10.24912/ja.v27i1.1206.
- [6] R. P. H. Sasmita, "Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan opini audit bpk terhadap understandability dalam kualitas laporan keuangan," *MODUS*, vol. 33, no. 1, pp. 98–119, Feb. 2021, doi: 10.24002/modus.v33i1.4171.
- [7] "Laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung tahun 2021," Badan Pemeriksa Keuangan, Nomor 81.a/LHP/XVI/05/2022, 2022.
- [8] "Laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung tahun 2022," Badan Pemeriksa Keuangan, Nomor 87.a/LHP/XVI/05/2023, 2023.

- [9] “Laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung tahun 2023,” Badan Pemeriksa Keuangan, Nomor: 33.a1/HPK/V05/2024, 2024.
- [10] E. a. S. Aboukhadeer, S. M. F. Azam, and A. R. S. Albattat, “Corporate Governance and International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) on the quality of accounting information in Libyan Government sector,” *International Journal of Professional Business Review*, vol. 8, no. 1, p. e0812, Jan. 2023, doi: 10.26668/businessreview/2023.v8i1.812.
- [11] S. D. Anggadini, N. Agustin, R. S. P. Agustin, D. N. Zahrany, A. Bramasto, and S. Damayanti, “Application of government accounting standards in government financial reporting,” *Proceeding of International Conference on Business Economics Social Sciences and Humanities*, vol. 6, pp. 352–361, Mar. 2023, doi: 10.34010/icobest.v4i.387.
- [12] Y. K. Shanti, S. S. Kusumawardhany, and S. Sudarmadi, “Understanding accounting in supporting reports quality finance at PT. Pasanggrahan Citra Persada,” *PUAN INDONESIA*, vol. 4, no. 2, pp. 287–300, Jan. 2023, doi: 10.37296/jpi.v4i2.120.
- [13] B. Jatmiko, N. Prawoto, R. P. Astuti, R. N. Sari, and K. F. Ardhi, “Application of Government Accounting Standards, Financial Statements Reporting, and Accessibility of Regional Finance Against Accountability for Regional Financial Management (Survey of All SKPDs of Kulon Progo Regency Government),” *Proceedings of the 5th International Conference on Accounting and Finance (ICAF 2019)*, Jan. 2019, doi: 10.2991/icaf-19.2019.2.
- [14] A. Q. Eshonqulov, “Assessing the Impact of International Cash Accounting Standards on Financial Statements of Enterprises,” *Deleted Journal*, vol. 1, no. 2, pp. 54–62, May 2023, doi: 10.61796/ejcbt.v1i2.127.
- [15] N. W. Djumiyati, N. K. Yunita, N. Muhsin, N. A. P. Karpriana, and N. Rusliyawaty, “Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Pemoderasi,” *EKOMA Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, vol. 4, no. 1, pp. 1834–1846, Nov. 2024, doi: 10.56799/ekoma.v4i1.6084.
- [16] C. Darmayanti, B. Budianto, and C. S. F. Hastuti, “Government Internal control system and quality of financial statements in West Aceh Regency, Indonesia,” *International Journal of Current Science Research and Review*, vol. 06, no. 04, Apr. 2023, doi: 10.47191/ijcsrr/v6-i4-23.
- [17] N. S. M. Nur, N. U. Sunarsih, and N. Dahlifah, “Disclosing the practice of internal control over financial reporting (PIPK) at the Supreme Court of the Republic of Indonesia,” *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, vol. 12, no. 3, pp. 376–383, May 2023, doi: 10.20525/ijrbs.v12i3.2557.
- [18] M. R. Setiawan and N. Nurasik, “Enhancing financial report quality in Indonesia through HR, standards, and controls,” *Indonesian Journal of Public Policy Review*, vol. 25, no. 2, Apr. 2024, doi: 10.21070/ijppr.v25i2.1394.
- [19] E. Yenni, A. T. Junaedi, and E. Wijaya, “The impact of government accounting standards implementation, internal control systems, and human resource competence on regional financial report quality,” *Journal of Applied Business and Technology*, vol. 5, no. 3, pp. 134–145, Sep. 2024, doi: 10.35145/jabt.v5i3.182.
- [20] E. A. Pratama, S. Sinadela, and G. Gushendarto, “Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan (Studi kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi),” *ECOMA Journal of Economics and Management*, vol. 2, no. 1, pp. 45–57, Apr. 2024, doi: 10.55681/ecoma.v2i1.38.
- [21] R. L. Utami, Yudi, and M. Erwati, “Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo,” *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, vol. 8, no. 2, pp. 283–302, Dec. 2023, doi: 10.30631/ijoieb.v8i2.1890.
- [22] F. Rakhman and S. Wijayana, “Human development and the quality of financial reporting among the local governments in Indonesia,” *Journal of International Accounting Auditing and Taxation*, vol. 56, p. 100634, Jun. 2024, doi: 10.1016/j.intaccaudtax.2024.100634.
- [23] Y. Duan and G. Qiao, “Detecting financial statements fraud: Evidence from listed companies in China,” *Deleted Journal*, vol. 2, no. 4, p. 301, Nov. 2024, doi: 10.62617/se.v2i4.301.
- [24] A. Alon and P. D. Dwyer, “SEC’s acceptance of IFRS-based financial reporting: An examination based in institutional theory,” *Accounting Organizations and Society*, vol. 48, pp. 1–16, Dec. 2015, doi: 10.1016/j.aos.2015.11.002.
- [25] R. Guerreiro, F. Frezatti, and T. Casado, “Em busca de um melhor entendimento da contabilidade gerencial através da integração de conceitos da psicologia, cultura organizacional e teoria institucional,” *Revista Contabilidade & Finanças*, vol. 17, no. spe, pp. 7–21, Aug. 2006, doi: 10.1590/s1519-70772006000400002.
- [26] R. A. P. Zandra, E. H. Soedarso, R. Prasetya, and A. Miharso, “Pendekatan Theory of Planned Behaviour dalam Rekayasa Perilaku Penggunaan Informasi Akuntansi Manajemen pada UMKM,” *Journal of Accounting and Finance Management*, vol. 5, no. 5, pp. 1127–1136, Nov. 2024, doi: 10.38035/jafm.v5i5.906.

- [27] M. Mukhlis Amrullah, "Implementasi Theory Of Planned Behavior Dalam Mendeteksi Minat dan Perilaku Fraud Pada Sektor Publik (Studi Pada Bagian Keuangan Di SKPD Se-Kota Probolinggo)," 2017. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/9454/>
- [28] S. Salsabila, R. Radhiana, J. Juwita, J. Juwita, and P. Mauliza, "Challenges of the Resource-Based View Approach in improving Business Organizational Performance," *Proceedings of International Conference on Multidiciplinary Research*, vol. 5, no. 2, pp. 120–125, Dec. 2022, doi: 10.32672/pic-mr.v5i2.5416.
- [29] Y. E. Rachmad, A. A. Bakri, S. Irdiana, J. Waromi, and A. A. J. Sinlae, "Analysis of the influence of financial information systems, internal control systems, and information technology on quality of financial reports," *Jurnal Informasi Dan Teknologi*, pp. 266–271, Mar. 2024, doi: 10.60083/jidt.v6i1.513.
- [30] S. Yeng and C. Oppong, "Audit Independence and Financial Reporting Quality: An Insight from Sub-Saharan African Stock Markets," *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research*, vol. 12, no. 5, pp. 1–16, Apr. 2024, doi: 10.37745/ejafr.2013/vol12n5116.
- [31] K. O. Amah and M. C. Ekwe, "Effect of corporate governance structure and financial reporting quality of quoted pharmaceutical companies in Nigeria," *Management Dynamics in the Knowledge Economy*, vol. 9, no. 2, pp. 225–239, Jun. 2021, doi: 10.2478/mdke-2021-0016.
- [32] S. Arvidsson and J. Dumay, "Corporate ESG reporting quantity, quality and performance: Where to now for environmental policy and practice?," *Business Strategy and the Environment*, vol. 31, no. 3, pp. 1091–1110, Nov. 2021, doi: 10.1002/bse.2937.
- [33] R. Aminy, E. Pituringsih, and E. Widiastuty, "Analisis Penerapan Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan," *Valid Jurnal Ilmiah*, vol. 18, no. 2, pp. 136–147, Jul. 2021, doi: 10.53512/valid.v18i2.181.
- [34] S.-C. Wong, "Competency Definitions, Development and Assessment: A Brief review," *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, vol. 9, no. 3, Sep. 2020, doi: 10.6007/ijarped/v9-i3/8223.
- [35] K. Denada, S. Suharni, and A. H. K. Broto, "Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, implementasi sistem informasi manajemen daerah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus di Kota Madiun)," *JAMER Jurnal Akuntansi Merdeka*, vol. 5, no. 1, pp. 18–27, May 2024, doi: 10.33319/jamer.v5i1.113.
- [36] B. Setyadi, S. Helmi, I. K. Azizah, and D. Sartika, "Factors affecting the quality of Palembang Regional Government Financial reports in South Sumatra, Indonesia," *Ilomata International Journal of Management*, vol. 5, no. 4, pp. 1278–1289, Aug. 2024, doi: 10.61194/ijjm.v5i4.1250.
- [37] C. L. Kewo and S. T. Kewo, "Measurement of factors that can improve the implementation of Accrual-Based Accounting in regional government agencies," *International Journal of Economics and Financial Issues*, vol. 14, no. 5, pp. 10–17, Sep. 2024, doi: 10.32479/ijefi.16467.
- [38] E. Yenni, A. T. Junaedi, and E. Wijaya, "The impact of government accounting standards implementation, internal control systems, and human resource competence on regional financial report quality," *Journal of Applied Business and Technology*, vol. 5, no. 3, pp. 134–145, Sep. 2024, doi: 10.35145/jabt.v5i3.182.
- [39] K. A. K. Saputra, B. Subroto, A. F. Rahman, and E. Saraswati, "Financial Management Information System, human resource Competency and Financial statement Accountability: a case study in Indonesia," *Journal of Asian Finance Economics and Business*, vol. 8, no. 5, pp. 277–285, May 2021, doi: 10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0277.
- [40] D. M. Lubis, M. K. Rusydi, and A. Prastiwi, "The role of the government's internal control system and human resource competence on the quality of financial reports with leadership commitment as moderation," *Journal of World Science*, vol. 2, no. 7, pp. 1062–1070, Jul. 2023, doi: 10.58344/jws.v2i7.335.
- [41] A. Sumaryati, E. P. Novitasari, and Z. Machmuddah, "Accounting information system, internal control system, human resource competency and quality of local government financial statements in Indonesia," *Journal of Asian Finance Economics and Business*, vol. 7, no. 10, pp. 795–802, Oct. 2020, doi: 10.13106/jafeb.2020.vol7.n10.795.
- [42] W. Dwi Prabtanto, G. Apriyanto, and H. Respati, "The effect of regional financial accounting system and human resources competency on regional financial report accountability with information quality mediation in Probolinggo Regency Government," *International Journal of Business Marketing and Management (IJBMM)*, vol. 6, no. Issue 9, Sep. 2021, [Online]. Available: <https://ijbmm.com/paper/Sep2021/8340436275.pdf>
- [43] V. N. Kartika and S. Ningsih, "The influence of internal control systems, implementation of government accounting standards, and human resource competence on financial report quality," *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, vol. 21, no. 2, pp. 24–38, Jul. 2024, doi: 10.14710/jaa.21.2.24-38.
- [44] K. B. Dwicahyo, T. U. Prasetyo, and R. W. Primadineska, "Sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah: studi pada badan narkotika nasional", *Akuntansi dan Teknologi*, vol. 16, no. 1, pp. 70–86, Jul. 2024.



- [45] R. Wijayanti and N. Handayani, "Pengaruh kompetensi SDM dan implementasi akuntansi akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol. 6, no. 3, Dec. 2019.
- [46] L. Schmidhuber, D. Hilgers, and S. Hofmann, "International Public Sector Accounting Standards (IPSASs): A systematic literature review and future research agenda," *Financial Accountability and Management*, vol. 38, no. 1, pp. 119–142, Jun. 2020, doi: 10.1111/faam.12265.
- [47] N. W. Afiqoh, "Application of accrual-based government accounting standards and obtaining fair opinions without exceptions," *Jurnal Akademi Akuntansi*, vol. 3, no. 2, pp. 244–259, Nov. 2020, doi: 10.22219/jaa.v3i2.12925.
- [48] N. A. O. Ajayi-Nifise, N. O. Olubusola, N. T. Falaiye, N. N. Z. Mhlongo, and N. A. I. Daraojimba, "A review of U.S. financial reporting scandals and their economic repercussions: investigating their broader impact and preventative measures," *Finance & Accounting Research Journal*, vol. 6, no. 2, pp. 183–201, Feb. 2024, doi: 10.51594/farj.v6i2.787.
- [49] H. Susanto, E. N. Sari, and M. Sari, "Factors affecting the quality of financial reports in the government of Langkat Regency," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, vol. 4, no. 4, pp. 12264–12278, Nov. 2021, doi: 10.33258/birci.v4i4.3291.
- [50] S. Mulyati, R. Ibrahim, and M. A. Djalil, "The effect of government accounting standard, quality of human resource, effectiveness of internal control system and regional financial accounting system on the quality of regional government financial statement (Study on SKPK Aceh Singkil District. Aceh Province Indonesia)," *International Journal of Business Management and Economic Review*, vol. 04, no. 06, pp. 258–268, Jan. 2022, doi: 10.35409/ijbmer.2021.3338.
- [51] F. T. Lantu, R. Pangkey, and O. Sumampouw, "Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara," *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, pp. 91–97, Apr. 2023, doi: 10.53682/jaim.vi.4255.
- [52] S. Hasanah and T. R. Siregar, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu," *JAKPI - Jurnal Akuntansi Keuangan & Perpajakan Indonesia*, vol. 9, no. 1, p. 39, Jun. 2021, doi: 10.24114/jakpi.v9i1.25706.
- [53] S. A. Turobov and B. B. Ugli, "Internal control in Banks," *European Journal of Business Startups and Open Society*, vol. 3, no. 3, Mar. 2023. [Online]. Available: <http://innovatus.es/index.php/ejbsos>
- [54] C. Kuntadi, N. C. Juwanto, and N. M. I. Zakaria, "Factors affecting the preparation of government financial statements: application of government accounting standards, utilization of information technology, and internal control system (Literature review of State Financial Management)," *Dinasti International Journal of Economics Finance & Accounting*, vol. 4, no. 2, pp. 326–333, May 2023, doi: 10.38035/dijefa.v4i2.1851.
- [55] Q. A. Alawaqleh, "The Effect of Internal Control on Employee Performance of Small and Medium-Sized Enterprises in Jordan: The role of Accounting Information System," *Journal of Asian Finance Economics and Business*, vol. 8, no. 3, pp. 855–863, Jan. 2021, doi: 10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0855.
- [56] M. M. Nur, A. Sopanah, and E. Puspitosarie, "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan," *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, vol. 10, no. 1, pp. 48–58, Jun. 2023, doi: 10.35838/jrap.2023.010.01.05.
- [57] P. Andriani, A. Suarsa, and Y. Yuniati, "Pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada pdam tirtawening Kota Bandung," *Sain Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi Rivi (SEMAR)*, vol. 1, no. 3, pp. 26–41, Dec. 2019, [Online]. Available: <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/semar/article/download/240/82>
- [58] S. Parinding, N. Sari, and R. A. Dasila, "Pengaruh standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Palopo," *Jurnal Akuntansi Bisnis*, vol. 16, no. 1, Feb. 2023, doi: 10.30813/jab.v16i1.4198.
- [59] P. M. Kruijen and M. Van Genugten, "Opening up the black box of civil servants' competencies," *Public Management Review*, vol. 22, no. 1, pp. 118–140, Jul. 2019, doi: 10.1080/14719037.2019.1638442.
- [60] D. Nurazizah, F. Azahra, W. Jannah, Moh. Y. Mahadianto, and N. Fariani, "Utilization of accounting information systems, human resource competencies, government accounting standards on the quality of local government financial statements," *Jurnal Ekonomi Teknologi Dan Bisnis (JETBIS)*, vol. 3, no. 4, pp. 779–791, May 2024, doi: 10.57185/jetbis.v3i4.100.
- [61] S. Hartati and F. G. Dewi, "The impact of human resource competency, implementation of government accounting standards, implementation of local financial accounting system, and new public management on the quality of the financial reports of the Bandar Lampung City Government," *Akselerasi Jurnal Ilmiah Nasional*, vol. 6, no. 1, pp. 145–157, Mar. 2024, doi: 10.54783/jin.v6i1.916.

- [62] F. Kabuye, K. Alinda, N. Bugambiro, and S. Kezaabu, "Intellectual capital, isomorphic forces and internal controls over financial reporting in Ugandan microfinance institutions," *Cogent Business & Management*, vol. 8, no. 1, Jan. 2021, doi: 10.1080/23311975.2021.1944960.
- [63] L. Wahongan, J. J. Tinangon, and H. R. N. Wokas, "The influence of human resource competency, utilization of information technology, and understanding of financial accounting standards on the quality of financial reports with an internal control system as an intervening variable at the GMAHK Head Office of the Eastern Indonesian Conference Union," *The Contrarian Finance Accounting and Business Research*, vol. 3, no. 1, pp. 1–13, Apr. 2024, doi: 10.58784/cfabr.116.
- [64] P. C. Susanto, D. U. Arini, L. Yuntina, J. P. Soehaditama, and N. Nuraeni, "Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka)," *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, vol. 3, no. 1, pp. 1–12, Apr. 2024, doi: 10.38035/jim.v3i1.504.
- [65] A. Husen, "Strategi pemasaran melalui digital marketing campaign di toko mebel Sakinah Karawang," *JURNAL ECONOMINA*, vol. 2, no. 6, pp. 1356–1362, Jun. 2023, doi: 10.55681/economina.v2i6.608.
- [66] I. Kristiana, E. P. Erlangga, and A. Sinarasri, "The Influence of Implementing Government Accounting Standards Based on Competence with The Use of Accounting Information Systems as A Moderation Variable," *Journal of Accounting Science*, vol. 8, no. 1, Jan. 2024, doi: 10.21070/jas.v8i1.1748.
- [67] J. Juniarti, L. Noersanti, and A. Gladys, "Financial Report quality: The role of Accrual-Based Government Accounting Standards and H.R. competency," *Taxation and Public Finance*, vol. 1, no. 1, pp. 1–8, Dec. 2023, doi: 10.58777/tpf.v1i1.157.
- [68] J.-H. Choi, S. Choi, C. E. Hogan, and J. Lee, "The effect of human resource investment in internal control on the disclosure of internal control weaknesses," *Auditing a Journal of Practice & Theory*, vol. 32, no. 4, pp. 169–199, May 2013, doi: 10.2308/ajpt-50514.
- [69] Y. C. Yeh, C. C. Venezia, and T.-Y. Yang, "The relationship between CFO qualifications and internal control weakness," *Financial Internet Quarterly*, vol. 18, no. 2, pp. 21–29, Jun. 2022, doi: 10.2478/fiqf-2022-0010.
- [70] D. Frederica, V. Cristina, and A. Munandar, "The Quality of Financial Statements with Human Resource Competence as Moderating Variables," *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol. 8, no. 1, pp. 91–105, Aug. 2023, doi: 10.23887/jia.v8i1.57263.
- [71] P. Karo-Karo, I. Irfan, and Z. Hanum, "The Effect of Human Resources Competence and Internal Control System on the Quality of Financial Statements with Organizational Commitment as a Moderating Variable at Three Public Hospitals in Pangkalan Kerinci - Riau," *Enrichment Journal of Management*, vol. 13, no. 1, pp. 568–577, Apr. 2023, doi: 10.35335/enrichment.v13i1.1283.
- [72] D. Astria, L. Linyansyah, and N. Aprini, "The effect of use of information technology and human resources competence on the quality of financial reports at the Ministry of Religion, Muara Enim District," *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi Review*, vol. 3, no. 1, Jun. 2023, doi: 10.53697/emba.v3i1.1223.
- [73] A. J. S. Harahap and E. Erlina, "Factors Improving the Quality of Local Government Financial Reporting Performance: A Mini Review approach," *West Science Business and Management*, vol. 2, no. 03, pp. 1038–1044, Sep. 2024, doi: 10.58812/wsbm.v2i03.1292.
- [74] K. Darwin, H. Haliah, N. Nirwana, S. Syamsuddin, and A. Kusumawati, "The implementation of governmental accounting standards and the quality of financial statements," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, vol. 13, no. 1, pp. 240–245, Jun. 2024, doi: 10.24090/jimrf.v13i1.11297.
- [75] J. G. Sabo, O. Ugwudioha, and J. P. Ways, "Effect of adoption of international public sector accounting standards on quality of financial reports in the public sector in Nigeria," *Journal of Law and Sustainable Development*, vol. 12, no. 7, p. e3772, Jul. 2024, doi: 10.55908/sdgs.v12i7.3772.
- [76] U. Yasis, "Influence of government accounting standards, systems internal control, regulatory compliance legislation on quality financial statements," *International Journal of Science and Society*, vol. 6, no. 1, pp. 235–254, Jan. 2024, doi: 10.54783/ijssoc.v6i1.1008.
- [77] A. W. Ghazali, N. A. Shafie, C. Ranran, and Z. M. Sanusi, "Internal Audit, internal control effectiveness, corporate governance structure and financial reporting quality: Investigating the internal line of defense of manufacturing firms in China," *International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences*, vol. 14, no. 4, Nov. 2024, doi: 10.6007/ijarafms/v14-i4/23092.
- [78] L. Wang and H.-W. Park, "Internal Control and Stock Price Informativeness about Future Earnings," *The Institute of Management and Economy Research*, vol. 14, no. 4, pp. 255–273, Dec. 2023, doi: 10.32599/apjb.14.4.202312.255.
- [79] H. Haerunnisa, N. L. A. Razak, and N. M. Muchran, "The effect of the internal control system on the quality of financial reports at PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar," *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)*, vol. 2, no. 2, Jan. 2024, doi: 10.55227/ijerfa.v2i2.52.

- [80] N. Y. Yamin, M. R. Lawaidjo, and Ridwan, "Moderation of human resource competencies in quality of financial statements: application of government accounting standards, utilization of information technology, and control environment," *Journal of Ecohumanism*, vol. 4, no. 1, Jan. 2025, doi: 10.62754/joe.v4i1.5968.
- [81] N. A. Z. Kamandita and N. S. Suwandi, "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Riset Akuntansi*, vol. 3, no. 1, pp. 80–106, Jan. 2025, doi: 10.54066/jura-itb.v3i1.2884.
- [82] A. S. Papra and B. A. Inapty, "Pengaruh siskeudes, kompetensi SDM dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan dengan pengendalian internal sebagai variabel intervening," *Owner*, vol. 8, no. 4, pp. 4611–4627, Oct. 2024, doi: 10.33395/owner.v8i4.2469.
- [83] A. Purwandari and T. D. Widajantie, "The influence of human resource competence, utilization of information technology, and internal control systems on the quality of financial report Public Health Center in the city of Surabaya," *International Journal of Business and Applied Economics*, vol. 3, no. 4, pp. 541–554, Jul. 2024, doi: 10.55927/ijbae.v3i4.9749.
- [84] R. Ardiyanto, S. Rahayu, and M. Gowon, "Influence of Competency Human Resources , Utilization Information Technology and Applications Accounting Standards Government (SAP) on the Quality of Financial Reports with Control Internal as an Intervening Variable (Empirical Study at BLUD Community Health Center in Musi Banyuasin Regency)," *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, vol. 3, no. 7, Jul. 2024, doi: 10.55927/eajmr.v3i7.9843.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*